

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada BKD Kabupten Boyolali. Dari populasi tersebut diambil sampel sesuai dengan kriteria hasil pemilihan sampel dengan menggunakan Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BKD Kabupten Boyolali. Dari populasi tersebut diambil sampel sesuai dengan kriteria hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut adalah tugas dari pegawai badan keuangan (BKD) kabupaten boyolali:

1. Kepala memiliki tugas memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantu bidang.
2. Sekertaris menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BKD.
3. Bidang pajak daerah memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pajak daerah, yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan penagihan dan pelaporan kegiatan dibidang pajak daerah.
4. Bidang perbendaharaan memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan

APBD pembinaan kebendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara dan penerimaan bendahara serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Bidang anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas.
6. Bidang akuntansi memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang akuntansi, mengkoordinasikan, mengendalikan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah.
7. Bidang pengelolaan dan pembiayaan aset daerah: memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah dan transaksi utang piutang dan investasi.
8. Bidang pengelolaan operasional pendapatan memiliki tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemanfaatan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran pendataan pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan kelokasi objek atau subjek pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan *Purposive sampling method* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten

Boyolali, pegawai yang bersedia menjadi responden dan pegawai yang mengisi kuesioner secara lengkap.

Proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel IV. 1

Tabel IV.1  
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Karyawan yang PNS	79
2	Jumlah Karyawan yang Tidak Bersedia Menjadi Responden	(8)
5	Jumlah karyawan yang Bersedia Menjadi Responden	71
6	Jumlah Kuesioner yang Tidak Diisi Lengkap Oleh Karyawan	2
7	Data Siap Diolah	69

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2018

## B. Deskripsi Data

### 1. Karakteristik Responden

Diskripsi responden digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin reponden, usia responden, jenis pendidikan responden dan lama pendidikan responden, berdasarkan hasil jawaban responden atas kuesioner yang telah diedarkan. Secara lebih rinci distribusi responden sebagai berikut:

#### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel IV.2  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	41	59,43
Wanita	28	40,57
Total	69	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 8

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 59,43% dan wanita sebanyak 40,57%. pegawai berjenis kelamin laki-laki biasanya cenderung bisa bekerja secara tim, sehingga pegawai yang berjenis kelamin laki laki dapat menyusun laporan keuangan secara baik.

b. Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia merupakan batasan umur responden dalam hal ini. Adapun keadaan usia responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3  
Karakteristik Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
≤ 30 Tahun	3	4,35
31-40 Tahun	28	40,58
41-50 Tahun	27	39,13
≥ 51 Tahun	11	15,94
Jumlah	69	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 8

Berdasarkan tabel diatas diketahuipegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali ≤ 30 tahun sebanyak 4,35%, berusia

antara 31-40 tahun sebanyak 40,58%, berusia antara 41-50 tahun sebanyak 39,13%, sedangkan yang berusia  $\geq 51$  tahun sebanyak 15,94%. Berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali berusia 31 – 40 tahun cenderung memiliki kemampuan menyajikan laporan keuangan secara baik dikarenakan pengalaman yang lama dalam bekerja. Sedangkan pegawai BKD kabupaten Boyolali yang berusia  $\leq 30$  tahun cenderung memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Karakteristik responden diidentifikasi berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4  
Karakteristik Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SMP/SMA	8	11,59
Diploma	13	18,85
S1	39	56,52
S2	9	13,04
S3	0	0,00
Jumlah	69	100

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 8

Berdasarkan tabel diatas diketahui pendidikan responden adalah sebagai berikut, responden yang berpendidikan SMP/SMA sebanyak 11,59%, responden yang berpendidikan Diploma

sebanyak 18,85%, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 56,52%, responden yang berpendidikan S2 sebanyak 13,04%, sedangkan responden yang berpendidikan S3 tidak ada. Berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali cenderung berpendidikan S1 yang memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sedangkan pegawai BKD kabupaten Boyolali berpendidikan SMP/SMA cenderung memiliki kemampuan yang kurang memadai dalam menyajikan laporan keuangan.

d. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja

Karakteristik berdasarkan lama bekerja pada tabel IV.5 berikut:

Tabel IV.5  
Karakteristik Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase(%)
1-5 Tahun	3	4,34
5-10 Tahun	18	26,09
>10 Tahun	48	69,57
Jumlah	69	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 8

Berdasarkan tabel tersebut diketahui lama bekerja responden adalah sebagai berikut, responden yang lama bekerjanya selama 1-5 tahun adalah sebanyak 4,34%, responden yang lama bekerjanya selama 5-10 tahun adalah sebanyak 26,09%, sedangkan responden yang lama bekerjanya >10 tahun adalah sebanyak 69,57%. Berarti pegawai BKD

kabupaten Boyolali yang lama bekerja lebih dar 10 tahun cenderung memiliki pengalaman yang baik dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sedangkan pegawai BKD kabupaten Boyolali yang lama bekerja antara 1 – 5 tahun cenderung memiliki pengalaman yang kurang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik.

## 2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikn informasi tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai terendah, niai tertinggi, nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi. Ringkasan hasil tabel statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel IV.6 sebagai berikut:

Tabel IV.6  
Statistik Deskriptif Data Uji

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
KLKP	69	24,00	40,00	33,1884	3,65930
SAP	69	33,00	55,00	43,4638	4,23771
KSDM	69	18,00	30,00	23,6097	2,69650
PSPI	69	30,00	50,00	41,2899	4,55716
PTI	69	24,00	40,00	32,9130	3,81460
KO	69	10,00	20,00	15,8986	2,46233

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 9

Berdasarkan tabel IV.6 diketahui bahwa jumlah responden (N) adalah 69. Hasil analisis dari statistik deskriptif variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai terendah 24,00 dan nilai tertingginya 40,00, nilai rata-rata (*mean*) adalah 33,1884 dan standar deviasi 3,65930. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali rata-rata menjawab setuju, berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali menyusun laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami .

Hasil analisis statistik deskriptif variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai terendah 33,00 dan nilai tertingginya 55,00. Nilai rata-rata (*mean*) adalah 43,4638 dan standar deviasainya 4,23771. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali rata-rata menjawab setuju, berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali sudah menerapkan SAP yang ada.

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai terendah 18,00 dan nilai tertingginya 30,00. Nilai rata-rata (*mean*) adalah 23,6087 dan standar deviasinya 2,69650 . Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali rata-rata menjawab setuju berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali menyusun laporan keuangan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dimiliki.

Hasil analisis statistik deskriptif variabel penerapan sistem pengendalian intern memiliki nilai terendah 30,00 dan nilai tertingginya



50,00. Nilai rata-rata (*mean*) adalah 41,2899 dan standar deviasinya 4,55716. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali rata-rata menjawab setuju berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali menyusun laporan keuangan sudah mempertimbangkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta melakukan pemantauan di dalam Badan Keuangann Daerah (BKD) kaupaten boyolali .

Hasil analisis statistik deskriptif variabel pemanfaatan Tekonologi Informasi memiliki nilai terendah 24,00 dan nilai tertinggi 40,00. Niai rata-rata (*mean*) adalah 32,9130 dan standar deviasinya 3,81460. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali rata-rata menjawab setuju memiliki pemanfaatan teknologi informasi yang baik, berart berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali menyusun laporan keuangan sudah menggunakan teknologi yang tersedia.

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai terendah 10,00 dan nilai tertinggi 20,00. Niai rata-rata (*mean*) adalah 15,8986 dan standar deviasinya 2,46233. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali rata-rata menjawab setuju, berarti pegawai BKD kabupaten Boyolali menyusun laporan keuangan sudah sesuai aturan dan norma – norma yang berlaku di dalam pekerjaan.

## C. Hasil Uji Kualitas Data

### 1. Uji Instrumen Data

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas didistribusikan kepada 70 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali, untuk dianalisis validitas dan reliabilitas dan hasil dari analisis tersebut dipergunakan sebagai bahan acuan dalam memperoleh data guna analisis lebih lanjut. Adapun faktor yang akan diukur adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi. Hasil Validitas dan Reliabilitas adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* sebagai berikut:

##### 1) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel IV.7  
Validitas instrument untuk  
Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No Item	r hitung	r table	Keterangan
KLK 1	0,817	0,1997	Valid
KLK 2	0,725	0,1997	Valid
KLK 3	0,815	0,1997	Valid
KLK 4	0,830	0,1997	Valid
KLK 5	0,808	0,1997	Valid
KLK 6	0,825	0,1997	Valid
KLK 7	0,555	0,1997	Valid
KLK 8	0,620	0,1997	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 10

Dari Tabel IV.7 diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah valid, karena  $r_{hitung} > r_{table}$  nilai  $sig < 0,10$ .

## 2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, adalah:

Tabel IV.8  
Validitas instrument untuk  
Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

No Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>table</sub>	Keterangan
SAP 1	0,615	0,1997	Valid
SAP 2	0,638	0,1997	Valid
SAP 3	0,698	0,1997	Valid
SAP 4	0,782	0,1997	Valid
SAP 5	0,675	0,1997	Valid
SAP 6	0,842	0,1997	Valid
SAP 7	0,769	0,1997	Valid
SAP 8	0,811	0,1997	Valid
SAP 9	0,732	0,1997	Valid
SAP 10	0,700	0,1997	Valid
SAP 11	0,718	0,1997	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 11

Dari Tabel IV.8 di atas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  nilai  $sig < 0,10$ .

### 3) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel

Kompetensi Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:

Tabel IV.9  
Validitas instrument untuk  
Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No Item	r hitung	r table	Keterangan
KSDM 1	0,718	0,1997	Valid
KSDM 2	0,703	0,1997	Valid
KSDM 3	0,685	0,1997	Valid
KSDM 4	0,529	0,1997	Valid
KSDM 5	0,710	0,1997	Valid
KSDM 6	0,583	0,1997	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 12

Dari Tabel IV.9 diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah valid, karena  $r_{hitung} > r_{table}$  nilai  $sig < 0,10$ .

#### 4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel

Penerapan Sistem Pengendalian Intern, sebagai berikut:

Tabel IV.10  
Validitas instrument untuk Variabel  
Penerapan Sistem Pengendalian Intern

No Item	r hitung	r table	Keterangan
PSPI1	0,784	0,1997	Valid
PSPI 2	0,790	0,1997	Valid
PSPI 3	0,760	0,1997	Valid
PSPI 4	0,781	0,1997	Valid
PSPI 5	0,765	0,1997	Valid
PSPI 6	0,766	0,1997	Valid
PSPI 7	0,715	0,1997	Valid
PSPI 8	0,663	0,1997	Valid
PSPI 9	0,653	0,1997	Valid
PSPI 10	0,701	0,1997	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 13

Dari Tabel IV.11 tersebut maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  nilai  $sig < 0,10$ .

#### 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, sebagai berikut:

Tabel IV.11  
Validitas instrument untuk  
Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
PTI 1	0,720	0,1997	Valid
PTI 2	0,745	0,1997	Valid
PTI 3	0,837	0,1997	Valid
PTI 4	0,855	0,1997	Valid
PTI 5	0,796	0,1997	Valid
PTI 6	0,702	0,1997	Valid
PTI 7	0,596	0,1997	Valid
PTI 8	0,680	0,1997	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 14

Dari Tabel IV.11 diatas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  nilai  $sig < 0,10$ .

#### 6) Komitmen Organisasi

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel Komitmen Organisasi, sebagai berikut:

Tabel IV.12  
Validitas instrument untuk Variabel Komitmen Organisasi

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
KO 1	0,845	0,1997	Valid
KO 2	0,865	0,1997	Valid
KO 3	0,780	0,1997	Valid
KO 4	0,785	0,1997	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 15

Dari Tabel IV.12 di atas maka dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan Komitmen Organisasi adalah valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  nilai  $sig < 0,10$ .

#### b. Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah rangkuman hasil pengujian yang menunjukkan nilai alpha pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi.

Tabel IV.13  
Hasil Reliabilitas

Variabel	r alpha	r tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan PEMDA	0,890	0,60	Reliabel
Penerapan SAP	0,907	0,60	Reliabel
Kompetensi SDM	0,731	0,60	Reliabel
Penerapan SPI	0,906	0,60	Reliabel
Pemanfaatan TI	0,883	0,60	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,837	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 16 – 18

Dari Tabel IV.13 menunjukkan bahwa semua variabel baik variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi adalah reliabel karena mempunyai nilai  $alpha\ cronbach > 0,6$ , sehingga dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

#### D. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan menggunakan *one-sampel Kolmogorov-Smirnov Test* yang dilakukan oleh *software SPSS*. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari perhitungan. Jika probabilitas signifikansinya di atas 5% maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Tabel IV.14  
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Undstandardized residual	0,200	P > 0,10	Normal

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 19



Berdasarkan tabel IV.14 hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* terhadap *Undstandardized residual* adalah 0,200, dapat diketahui bahwa *p-value* untuk data ternyata lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $p > 0,10$ ), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Hasil uji ini dapat diketahui dari bila *Variance Inflation Factor* (*VIF*), jika nilai *VIF* lebih kecil dari 10 maka nilai *tolerance*  $> 0,1$ , maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel IV.15  
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Toleranc</i> <i>e</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Penerapan SAP	0,612	1,633	Bebas Multikolinieritas
Kompetensi SDM	0,555	1,803	Bebas Multikolinieritas
Penerapan SPI	0,502	1,991	Bebas Multikolinieritas
Pemanfaatan TI	0,527	1,899	Bebas Multikolinieritas
Komitmen Organisasi	0,599	1,671	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 20

Dari tabel IV. 15 diatas dapat diketahui bahwa  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$ , sehingga tidak terjadi Multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain

Tabel IV. 16  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sign	P*	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,645	p>0,10	Bebas Heteroskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,227	p>0,10	Bebas Heteroskedastisitas
Penerapan Sistem Pengendalian Intern	0,394	p>0,10	Bebas Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,147	p>0,10	Bebas Heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi	0,892	p>0,10	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 21

Dari Tabel IV.16 hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai  $p > 0,10$  atau tidak signifikan pada  $\alpha = 10\%$ . Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

## E. Uji Hipotesis

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern,

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan penggunaan rumus tersebut, penulis menggunakan program SPSS 21.00. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS, maka hasilnya dapat dilihat dari tabel IV.17 dibawah ini:

Tabel IV.17  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	T	Sig	Keterangan
(Constant)	4,968			
Penerapan SAP	0,177	1,689	0,096	H1 diterima
Kompetensi SDM	0,357	2,068	0,043	H2 diterima
Penerapan SPI	0,055	0,508	0,613	H3 ditolak
Pemanfaatan TI	0,101	0,806	0,423	H4 ditolak
Komitmen Organisasi	0,411	2,261	0.0027	H5 diterima

Sumber: Hasil Analisis, 2018, Lampiran 22

Hasil analisis regresi linier berganda pada table IV.17 secara sistematis persamaannya adalah sebagai berikut:

$$KLKP = 4,968 + 0,177 SAP + 0,357 KSDM + 0,055 PSPI + 0,101 PTI + 0,411 KO + e$$

Dari hasil persamaan diatas maka interprestasi dari masing-masing koefisien variabel adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 4,968 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi, diasumsikan konstan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.
- b. Koefisien regresi pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,177 menunjukkan bahwa jika penerapan standar akuntansi pemerintah itu semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik.
- c. Koefisien regresi pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,357 menunjukkan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia itu semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan berkualitas.
- d. Koefisien regresi pada variabel penerapan sistem pengendalian intern sebesar 0,055 menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern itu semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik.
- e. Koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,101 menunjukkan bahwa jika memanfaatkan teknologi informasi itu semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik.
- f. Koefisien regresi pada variabel komitmen organisasi sebesar 0,411 menunjukkan bahwa jika berkomitmen organisasi itu semakin baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik.

## 2. Uji F

Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel IV.18.

Tabel IV.18

Hasil Uji F

<b>F<sub>hitung</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
9,686	1,94	0,000	Berpengaruh Secara Simultan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018. Lampiran 23

Uji F digunakan untuk menguji apabila semua variabel digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh sebagai berikut:

Untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didapatkan bahwa nilai F hitung 9,686 dengan  $p\text{-value} = 0,000$ , sedangkan F tabel 2,36 dengan ketentuan  $\alpha = 10\%$ ,  $df = k-1$  atau  $6 - 1 = 5$ , dan  $df_2 = n-k$  atau  $69-6 = 63$ , hasil uji dari distribusi F hitung 9,686 lebih besar dari F tabel 1,94 dengan  $p\text{-value} 0,000 < 0,10$ . Jika dapat disimpulkan bahwa model sudah *fit of goodness*.

## 3. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil R<sup>2</sup> pada tabel berikut:

Tabel IV.19

Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model	R	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error of the Estimate
1	0,659	0,435	0,390	2,858

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018. Lampiran 24

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R2*) sebesar 0,390, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (penerapan standar akuntansi pemerintah pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi) menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BKD Kabupaten Boyolali sebesar 39,0% dan sisanya 61,0% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar modal.

#### 4. Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t pada tabel berikut:

Tabel IV.20  
Hasil Uji t

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig	Keterangan
SAP	1,689	1,998	0,096	H <sub>1</sub> Diterima
KSDM	2,068	1,998	0,043	H <sub>2</sub> Diterima
PSPI	0,508	1,998	0,613	H <sub>3</sub> Ditolak
PTI	0,806	1,998	0,423	H <sub>4</sub> Ditolak
KO	2,261	1,998	0,027	H <sub>5</sub> Diterima

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018. Lampiran 25

Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 10%, dan jika *p*-

*value* lebih kecil dari tingkat signifikan 10% maka, dapat dikatakan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut:

- a. Dari perhitungan *t* hitung dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1,689 lebih besar dari *t* tabel 1,293 dan nilai sig sebesar 0,096 lebih kecil dari 10%, sehingga H1 diterima, artinya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Dari perhitungan *t* hitung dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 2,068 lebih besar dari *t* tabel sebesar 1,293 dan nilai sig sebesar 0,043 lebih kecil dari 10%, sehingga H2 diterima, artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Dari perhitungan *t* hitung dari variabel penerapan sistem pengendalian intern sebesar 0,508 lebih kecil dari *t* tabel sebesar 1,293 dan nilai sig sebesar 0,613 lebih besar dari 10%, sehingga H3 ditolak, artinya penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- d. Dari perhitungan *t* hitung dari variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,806 lebih kecil dari *t* tabel 1,293 dan nilai sig 0,423 lebih besar

dari 10%, sehingga H4 ditolak, artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- e. Dari perhitungan t hitung dari variabel komitmen organisasi sebesar 2,261 lebih besar dari t tabel 1,293 dan nilai sig 0,027 lebih kecil dari 10%, sehingga H4 diterima, artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **F. Pembahasan**

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi yang meliputi penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi kontruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan keuangan konsolidasi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas.

Oleh karena itu ketika standar akuntansi pemerintah di terapkan dengan baik dan benar maka sudah pasti laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin berkualitas karena sudah di susun sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini ini konsisten dengan penelitian inapati dan RR. Sri,(2016), yuliani dan rahmawati,(2016), yang menunjukkan bahwa



penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi SDM merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan SAP dan sering membaca literatur berupa jurnal maupun buku-buku akuntansi.

SDM yang sering mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan akan lebih mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Sehingga pembuatan laporan keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien.

SDM yang bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan serta menolak setiap intervensi dari atasan akan dapat menyusun laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak mengakibatkan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada BKD. Dengan demikian kualitas laporan keuangan akan menjadi lebih baik.

Penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmara dan Rahayu (2016), Setyowati et al., (2016)

dan Firdaus et al., (2015) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena didalam pelaksanaan SPI secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi tidak mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. SPI secara lengkap dan menyeluruh belum sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.

Didalam pelaksanaan sistem pengendalian intern secara terus menerus setiap hasil temuan belum tentu dapat mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi, Sehingga menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian SPI tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

penelitian ini ini konsisten dengan penelitian Septarini dan Papilaya (2016) yang menunjukkan bahwa Penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang fungsinya meningkatkan kualitas laporan keuangan baik dalam hal keakurasian maupun ketepatan waktu dalam penyiapan laporan keuangan.

Hal ini dijelaskan bahwa ssebaik-baiknya pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian dapat terlihat dari kurangnya jumlah komputer yang memadai, kurangnya jaringan internet yang memudahkan pegawai dalam akses dan transfer data, kemudian proses penyusunan laporan keuangan di setiap SKPD sudah dibantu dengan suatu aplikasi akuntansi tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Di era globalisasi seperti saat ini teknologi informasi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi di dalam pembuatan laporan keuangan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian aini (2015) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

5. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

komitmen yang kuat dalam organisasi akan dapat menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, di mana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya.

Karyawan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolalimemiliki komitmen yang tinggi dalam organisasi akan secara aktif bekerja dalam organisasi sehingga karyawan tersebut akan menunjukkan keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karyawan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik atau dapat dikatakan berkualitas.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Widari dan Sutrisno (2017) dan Ramadhan (2015) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.